

**STRATEGI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS  
PENGUATAN MODAL SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN  
METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) (Studi Kasus Pada Kabupaten Pringsewu  
Provinsi Lampung)**

*Erlan Eka Damayanti<sup>1</sup>, Tri Wahyudi<sup>2</sup>, Satria Abadi<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu Lampung

Jalan Wisama Rini No.09 Pringsewu, Lampung, Indonesia

e-mail: [triwahyudi230991@gmail.com](mailto:triwahyudi230991@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Pembangunan Nasional mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat yang madani. Pembangunan ini menargetkan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan terbebas dari kemiskinan, oleh karena itu pembangunan di daerah berperan penting karena akan mempengaruhi tingkat perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia dan kemiskinan ini mempunyai implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat khususnya di daerah pedesaan perlu adanya strategi terbaik yang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model strategi penurunan tingkat Kemiskinan berbasis pada penguatan Modal Sosial (modal sosial mikro dan modal sosial meso) selain itu berorientasi pada aspek-aspek kesejahteraan masyarakat di kabupaten Pringsewu propinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan pada daerah yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin berturut-turut tiap tahun. Metode penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process untuk menentukan program atau kegiatan utama dan subkegiatan yang menjadi prioritas dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah terkait sebagai bahan atau acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dalam penyelesaian masalah kemiskinan.*

**Kata Kunci:** Penurunan Tingkat Kemiskinan Penguatan Modal Sosial, Kesejahteraan Masyarakat

**1. PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa sejalan dengan tujuan tersebut perlu berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan daerah, khususnya ialah pembangunan daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan memiliki implikasi yang dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani. Djohadikusumo (1995) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka. Berawal dari kemiskinan, maka bermunculan berbagai masalah sosial lainnya seperti kriminalitas dan masalah sosial lainnya yang 90% disebabkan oleh faktor ekonomi[1].

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu ialah daerah agraris, struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh Sektor Pertanian dengan komoditas yang dominan adalah Padi sawah dan padi ladang, padi organik, jagung dan juga komoditas sayur mayur serta ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah dan juga kacang hijau. Kabupaten ini sangat didominasi oleh sektor pertaniannya, khususnya areal padi organik. Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2017, total luas areal pertanian untuk padi organik di Kabupaten Pringsewu adalah 193 Ha dengan produksi rata-rata sekitar 770 ton/tahun. Sentra padi organik ini terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Gadingrejo, besar yang sebagian dikembangkan dengan menggunakan pupuk kompos dan pestisida nabati sehingga memiliki cita rasa dan harga jual lebih tinggi sekitar 30-40% dibandingkan dengan padi pada umumnya. Potensi ini dapat dikembangkan dengan adanya Lahan yang tersedia dan SDM petani yang ada, serta terbukanya peluang pengembangan industri penggilingan beras[1][2].

BPS Kabupaten Pringsewu, jumlah penduduk miskin di kabupaten Pringsewu menunjukkan pertambahan jumlah total penduduk miskin yang cukup signifikan yaitu mencapai 8,19 ribu jiwa penduduk atau kenaikan sebesar 1,98% pada tahun 2014 ke tahun 2015 dan pada tahun berikutnya masih belum ada penurunan dalam jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan angka kemiskinan menjadi permasalahan yang urgensi untuk diselesaikan. Untuk membenahinya harus diupayakan langkah-langkah: a. penguatan modal di lokasi lokasi yang telah memiliki jaringan kerjasama yang kuat dan b. membangun kembali

modal sosial yang mulai memudar di sejumlah lokasi c. Penanaman dan penumbuhan modal social kepada masyarakat dilakukan melalui proses pemberdayaan. Tujuan kegiatan berbasis modal sosial pada masyarakat pedesaan yaitu: 1. Meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat miskin, 2. Menguatkan solidaritas sosial masyarakat, 3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sumberdaya dan kesempatan pendidikan, 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu berdasarkan uraian pada PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) penguatan kegiatan sosial pada aspek kesejahteraan masyarakat yaitu antara lain: 1. Peningkatan angka Harapan Hidup, 2. Pendidikan, dan 3. Daya beli masyarakat dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan masyarakat.

Banyaknya aspek atau kompleksnya kriteria dan subkriteria kegiatan untuk merancang strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, menyebabkan kegiatan atau program-program kegiatan yang dilaksanakan belum secara efektif dan efisien dilakukan. Hal ini disebabkan belum adanya kegiatan prioritas yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu kompleksnya program yang dirancang dan diusulkan menjadi masalah yang perlu diputuskan oleh pemerintah Daerah (PEMDA). Penelitian ini bertujuan untuk merancang model strategi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan berbasis pada penguatan modal sosial (*social capital*) dan aspek kesejahteraan masyarakat menggunakan metode AHP.[6]

Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) adalah metode yang berguna membantu pengambil keputusan untuk mendapat keputusan terbaik dengan membandingkan faktor-faktor yang berupa kriteria (Feridani, 2005). AHP merupakan suatu alat analisa yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pada kondisi dengan faktor-faktor yang kompleks, terutama jika keputusan tersebut bersifat subjektif. Penelitian ini penting dilakukan sebagai penentu kriteria dan subkriteria kegiatan yang menjadi prioritas untuk mengetahui untuk setiap bobot kegiatan yang dilakukan dalam strategi penurunan kemiskinan masyarakat pedesaan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengambil keputusan yaitu pemerintah daerah setempat sebagai bahan acuan dalam memberikan kebijakan dalam melaksanakan program atau kegiatan tahunan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Media Sosial dan Masyarakat Madani

Modal sosial adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Jika anggota komunitas yakin bahwa anggota yang lain dapat dipercaya dan jujur, maka mereka akan saling percaya. Kepercayaan itu seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan lebih efisien. Norma-norma yang menghasilkan modal sosial meliputi nilai-nilai kejujuran, menunaikan kewajiban, dan berlangsung secara timbal-balik (Fukuyama, 2005).[5]

Lyda Judson Hanifan (1916) ialah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah modal sosial untuk menggambarkan pusat masyarakat sekolah di pedesaan yang menggunakan norma-norma sebagai pengikatnya. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan permukiman padat Amerika yang memiliki ikatan norma yang lebih kuat ketimbang perumahan yang baru dibangun belakangan sebagaimana digambarkan oleh Jane Jacobs (*The Death and Life of Great American Cities*). Mereka memiliki jaringan sosial yang berhasil membentuk modal sosial untuk mendorong terwujudnya rasa aman dalam kehidupan komunitasnya [7].

Jika penguatan modal sosial hanya dianggap sebagai pengembangan jaringan hubungan (fisik) antara komponen kepercayaan (*trust*), jaringan hubungan kerja (*net-work*), dan kerja sama (*cooperation*), sebagaimana banyak dikemukakan oleh kalangan pakar (ekonomi) di negara maju. Hal ini dinilai masih relatif superfisial dan belum menyentuh langsung akar atau inti dari penguatan modal sosial itu sendiri. Inti modal sosial adalah nilai-nilai budaya. Penguatan modal sosial perlu diawali dari penguatan nilai-nilai budaya setempat. Selain nilai-nilai budaya, elemen modal sosial yang dinilai penting dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah kompetensi SDM atau sumberdaya manusia (*human capital*), manajemen sosial dan keorganisasian masyarakat madani (*civil society*) yang kuat, struktur sosial yang tidak timpang, kepemimpinan lokal yang kuat, sistem moral dan hukum yang kuat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.[8]

Dalam proses transformasi masyarakat miskin (yang tidak berdaya) menuju masyarakat mandiri, dengan berbasis modal sosial dan kesejahteraan masyarakat akan sangat strategis menemukan momentumnya pada saat kegiatan-kegiatan mulai beranjak dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri. Selanjutnya transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani yaitu intervensi mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani lebih dititikberatkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penguatan modal sosial dan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya masyarakat madani, yakni proses pembelajaran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada penguatan modal sosial menuju terwujudnya masyarakat yang madani.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Sumber Data dan Sample

Data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban responden yang menjawab kuesioner penelitian. Responden ialah masyarakat daerah atau pedesaan yang terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan daerah (Camat, Lurah, Kepala Pekon) dan pengambil keputusan pada Pemerintah Daerah daerah terkait. Penelitian ini akan menggambarkan jawaban daripada responden yang ahli dibidangnya dalam menyusun perencanaan strategis pembangunan Daerah khususnya Pedesaan. Dipilihnya pimpinan pemerintahan daerah karena dianggap paling mengetahui kondisi di Pekon atau pedesaan yang sesuai dengan penelitian ini.

#### 3.2 Analytical Hierarchy Process

Pada awal tahun 1970-an di kembangkanlah metode pengambilan keputusan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) oleh salah seorang profesor matematika dari university of fittsburgh, Amerika Serikat, metode ini di kembangkan karena untuk menganalisa kebutuhan akan alokasi dan perencanaan sumber daya yang tidakmen cukupi untuk keperluan militer.AHP merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pada kondisi dengan faktor-faktor yang kompleks, terutama jika keputusan tersebut bersifat subjectif (Bhutta & Haq, 2002). AHP menghasilkan pendekatan terstruktur untuk menentukan nilai dan bobot untuk permasalahan multi-keriteria dan menstandarisasinya sehingga dapat saling di bandingkan dan dapat diambil suatu keputusan.[12][13][14]

AHP di bangun berdasarkan fakta-fakta dan pemikiran fundamental yang di landasi oleh prinsip dasar manusia dalam berfikir analitis sebagai berikut ini (Peniwati, 2000)

- 1 Pikiran manusia mampu membandingkan dua objek berbeda terkait dengan sifat umumnya.
- 2 Perbandinganberpasangan adalah cara yang paling akurat untuk mendapatkan prioritas relati dari sekumpulan objek.
- 3 Pikiran manusia tidak konsisten, namun individu yang memiliki inforemasi baik akan memiliki pemikiran yang koheren(bertalian secara logis). Menjadi tidak konsisten penting untuk belajar, namun menjadi konsisten adalah lebih penting untuk membuat keputusan.
- 4 Data yang kuantitatif tentang maslah harus diubah menjadi data yang dapat di integrasikan dengan informasi kualitatif lain yang di perlukan untuk memikirkan rencana secara konsisten. Data kuantitatif dlam bentuk mentah tidak dapat di gunakan untuk tujuan ini,
- 5 namun ditentukan dari pengukuran yang alami. Untuk alasan ini , Saaty (1993) membuat skala fundamental AHP dan menjaga bahwa objektivitas di setuju dibanding subjektivitas. Secara teknis, aplikasi AHP terdiri dari menyusun hirarki. mendapat penilaian melalui perbandingan berpasangan yang akan disintesis menjadi prioritas lokal dan global, memastikan konsistensi pada tingkat yangdapat diterima,mengevaluasi keluaran dan membuat perubahan jika di perlukan.[3][4][5]

#### 3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian yaitu kuesioner Tahap 1 dan 2. Metode kriteria seleksi dan sub kriteria bobot terbagi menjadi dua tahap item, yaitu:

- 1) Kriteria seleksi dan sub kriteria (Kuesioner Tahap I) yang akan menjadi acuan utama dalam model hirarkis dalam menentukan kriteria dan subkriteria program atau kegiatan berbasis modal sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perancangan sistem pembuatan keputusan atribut ganda dengan AHP. Pada tahap ini peneliti mengambil indikator yang dibuat dalam menentukan program atau kegiatan yang menjadi kriteria dan subkriteria pada model strategis
- 2) Tahap II: Kriteria bobot dan prioritas dan subkriteria. 1. Pada tahap ini, berdasarkan hasil kuesioner 1, kuesioner dikembangkan untuk tahap kedua. Pada kuesioner tahap 2, responden diminta untuk menentukan kriteria pembobotan dan sub kriteria untuk mengisi kuesioner secara berpasangan dengan membandingkan kepentingan relatif kriteria dan subkriteria.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Perancangan Sistem Penentuan Kriteria

Sistem *multiple attribut decision making dengan metode AHP* Pada tahap I peneliti mengambil keriteria yang telah ada untuk di jadikan indikator dalam menentukan faktor-faktor yang menentukan strategi penurunan kemiskinan masyarakat tersebut akan dibuat 5 skala penilaian yang nilainya adalah: 5= Sangat Setuju, 4= Setuju, 3= Kurang Setuju, 2= Tidak Setuju, 1= Sangat Tidak Setuju

#### 4.2 Kriteria yang Dibutuhkan

Kriteria yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa penelitian sebelumnya (Tri, 2006; PNPM, 2010; Saleh, 2018). Variabel yang digunakan oleh peneliti adalah:

- C1= Modal Sosial Mikro
- C2= Modal Sosial Meso
- C3= Angka Harapan Hidup
- C4= Pendidikan
- C5= Profesionlisme

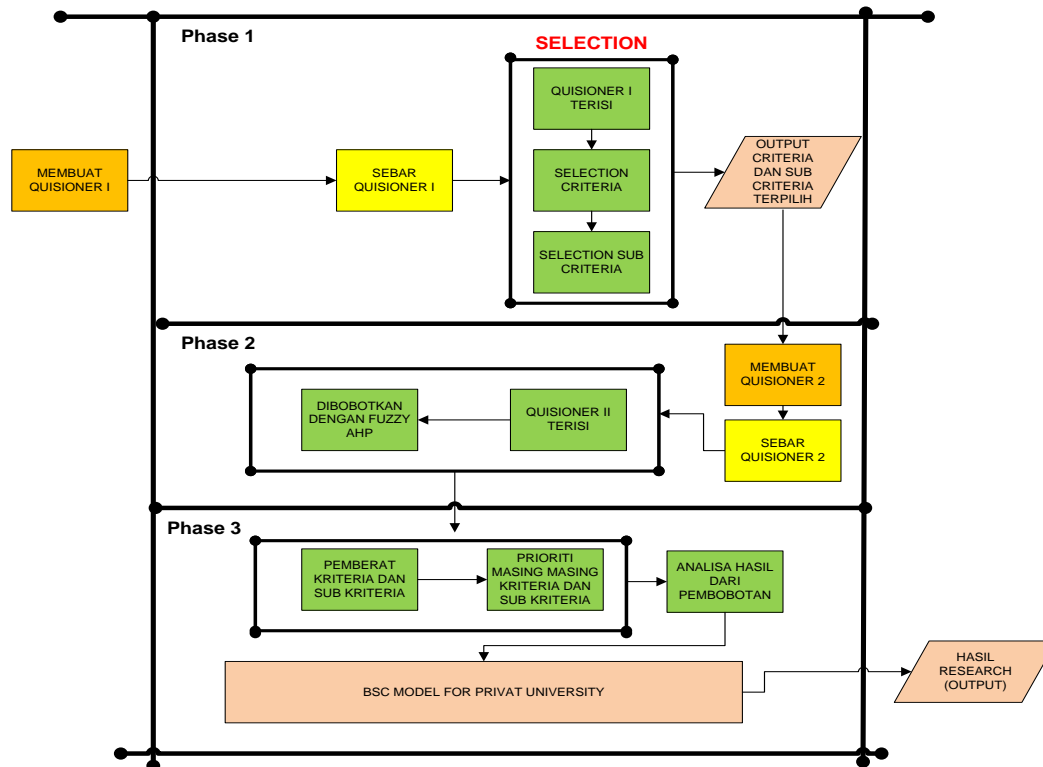
Tabel 1 Kriteria dan Sub kriteria Penelitian [15]

Kriteria (Indikator) Kegiatan Sosial	Subkriteria/ Sub Komponen Kegiatan Sosial	Komponen
1. Modal Sosial Mikro	1.1 Kepercayaan (trust)	Sosial
	1.2 Tindakan Proaktif	
	1.3 Kewajiban (obligation)	
	1.4 Kerjasama dalam keluarga	
2. Modal Sosial Meso	2.1 Kegiatan Penyuluhan	Sosial
	2.2 Norma Sosial (Sosial Norm)	
	2.3 Tingkat kemandirian	
3. Angka harapan Hidup	3.1 Pemberian Makanan Tambahan Balita	Sosial
	3.2 Pemberian Makanan Tambahan Ibu	
	3.3 Pemberian Makanan Tambahan Lansia	
	3.4 Pemberian Gizi	
	3.5 Imunisasi	
	3.6 Penyediaan Alat-alat kegiatan	Sosial
	3.7 Pembangunan Posyandu/Pos Kesehatan	Infrastuktur
	3.8 Fogging	Sosial
4. Pendidikan	4.1 Beasiswa	Sosial
	4.2 Pengadaan Alat-alat Pendidikan	
	4.3 Pengadaan Prasarana Sekolah	
	4.5 Peralatan Sekolah	
	4.6 Pembagunan Prasarana Sekolah	Infrastuktur
	5. Peningkatan Daya Beli	5.1 Pelatihan-Pelatihan Peningkatan Kapaitas
5.2 Semua Jenis Ternak bergulir		
5.3 Semua Jenis Kegiatan Perguliran		Ekonomi

(PNPM, 2010; Abdullah, 2013; Saleh, 2018)

#### 4.3 Rancangan Penelitian Research Design

Rancangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih menjurus kepada cara serta bagaimana untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang ada. Selain itu juga merupakan metode untuk memperoleh hasil penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Rancangan penelitian merujuk kepada penggunaan cara yang paling berdampak untuk memperoleh hasil yang mencapai tujuan penelitian dengan biaya yang minimum. Rancangan penelitian menghasilkan aliran atau langkah langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dari awal hingga akhir. Berikut ialah gambar rancangan yang digunakan pada penelitian ini:



Gambar 1 Research Design

Kaedah penelitian ini, mengikuti tahapan-tahapan berikut ini

**Tahap I:**

1. Penelitian ini dimulai dari pembuatan kuesioner I, kuesioner I di peroleh dari beberapa rujukan penelitian terdahulu khususnya elemen-elemen penguatan Modal sosial
2. Peringkat seterusnya adalah kuesioner I diberikan kepada responden iaitu: Pemimpin masyarakat daerah terkait atau pekon/desa dan kuesioner juga diberikan melalui media *online* (e-mel, rangkaian sosial dsb) kepada pengambilan keputusan di Pemerintahan daerah terkait.
3. Setelah kuesioner 1 terisi langkah selanjutnya menentukan Kriteria dan Subkriteria yang telah dipilih oleh responden. Kriteria dan sub kriteria terpilih dari tahap ini, oleh peneliti akan diolah dengan menghitung nilainya untuk menentukan jumlah nilai. Untuk menentukan jumlah nilai keriteria dan sub keriteria peneliti menggunakan formula:

$$= 75\% \times (\sum \text{Responden} \times \text{Skor Maksimum})$$

Jika jumlah nilai minimum tercapai maka kriteria dan subkriteria tersebut menjadi kriteria dan subkriteria yang terpilih sebagai penunjuk dalam penentuan prestasi.

**Tahap 2:**

1. Pada tahap ini, berdasarkan hasil kuesioner I, dibuatkuesioner tahap kedua. Pada borangkuesioner II Responden diminta untuk mempeberatkan kriteria dan sub kriteria dengan mengisi borangkuesioner perbandingan berpasangan AHP (Borangkuesioner Tahap I). Responden diminta membandingkan secara berpasangan tahap kepentingan relatif kriteria dan subkriteria untuk merancang strategi penurunan tingkat kemiskinan.
2. Penyelidik akan memberikan kuesioner tahap II kepada responden untuk menghitung bobot kriteria dan sub keriteria. Responden dari tahap I ialah sebaiknya sama dengan responden kuesioner tahap II.
3. Kemudian setelah kuesioner terisi oleh responden maka penyelidik akan menghitung bobot elemen-elemen pada model hirarki dengan cara berpasangan. Perbandingan berpasangan dalam matriks perbandingan berpasangan ini merupakan hasil perhitungan **rata-rata geometri** dari penilaian responden, iaitu seluruh hasil jawaban responden ddihitung berdasarkan rata-rata geometri:

$$R = [(1 + R_1) (1 + R_2) (1 + R_3) \dots (1 + R_n)]^{1/n} - 1$$

Keterangan:

$R_1 \dots R_n$  = Hasil jawaban responden 1 sampai dengan responden n

Hasil kuesioner tersebut diolah menggunakan AHP setelah dilakukan analisis nilai konsistensinya terlebih dahulu, jika rasio inkonsistensinya lebih kecil atau sama dengan 0.1 maka model hirarki yang diperoleh konsisten dan proses boleh dilanjutkan dengan pemberatan dengan pengurutan kriteria. Jika rasio tidak konsisten lebih dari 0,1 maka diperlukan peninjauan ulang data kuesioner iaitu dengan tidak mengikut sertakan kuesioner yang menyebabkan tidak konsisten, setelah itu barulah kuesioner akan diproses ulang.

Tabel 2 Skala Perbandingan

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama Penting	Kedua elemen menyumbang sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen Lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominan terhadap elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak lebih penting dari kriteria lainnya	Bukti yang menyokong elemem yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai tengah di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi di perlukan antara dua pertimbangan
Kebalikan dari atas	Jika aktivitas I mempunyai salah satu nilai boakn nol diatas ketika dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan ketika dibandingkan dengan i	

#### 4.4 Analisis Pengolahan Data dengan Metode AHP

Pada tahap ini pengolahan data dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

1. Menggabungkan penilaian responden terhadap tingkat kepentingan relatif setiap kriteria dan sub kriteria. Penilaian Kelompok dalam AHP dapat digabungkan menjadi satu penilaian yaitu melalui rata-rata geometris dari penilaian responden. Penilaian ini menjadi input untuk pengolahan data menggunakan Expert Choice 2000.
2. Menghitung bobot yang merupakan prioritas untuk setiap kriteria dan sub kriteria serta rasio inkonsistensinya menggunakan Expert Choice 2000.

#### 4.5 Hasil yang Dicapai

##### 4.5.1 Penentuan Responden

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban responden. Responden dalam penelitian ini ialah masyarakat daerah atau pedesaan yang terlibat dalam kepemimpinan pemerintahan daerah (Camat, Lurah, Kepala Pekon) dan pengambil keputusan pada Pemerintah Daerah daerah terkait. Penelitian ini akan menggambarkan jawaban daripada responden yang ahli dibidangnya dalam meyusun perencanaan strategis pembangunan Daerah khususnya Pedesaan. Dipilihnya pimpinan pemerintahan daerah karena dianggap paling mengetahui kondisi di Pekon atau pedesaan yang sesuai dengan penelitian ini.

Berdasarkan Bappeda Kabupaten Pringsewu dalam Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan BPS Kabupaten Pringsewu, secara keseluruhan pada tahun 2017 wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu mencakup 9 kecamatan, 126 pekon dan 5 kelurahan. Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Pekon Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung [15][17]

No.	Kecamatan	Jumlah Pekon/Kelurahan
1	Pardasuka	13
2	Ambarawa	8
3	Pagelaran	22
4	Pringsewu	15
5	Gadingrejo	23
6	Sukoharjo	16
7	Banyumas	11
8	Adiluwih	13
9	Pagelaran Utara	10
	<b>Jumlah</b>	<b>131</b>

(BPS Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)

Penentuan sampel dilakukan dengan dengan pendekatan *justify random sampling* untuk menentukan sample responden yang terpilih. Tabel diatas merupakan jumlah populasi sampling responden yaitu, 9 kecamatan dengan 131 pekon atau kelurahan di kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung.

#### 4.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di beberapa Kecamatan dan Pekon kabupaten Pringsewu.

#### 4.6 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria dan sub kriteria yang tidak terpilih atau menurut responden mempunyai skor total tidak mencukupi 75, yaitu:

Tabel 4. Hasil Penelitian

No	Kriteria dan Sub Kriteria Komponen Kegiatan Sosial sebagai Strategi Penurunan Kemiskinan	Skor
<b>1</b>	<b>Modal Sosial Mikro</b>	84
<b>1.1</b>	Kepercayaan (trust)	82
<b>1.2</b>	Tindakan Proaktif	85
<b>1.3</b>	Kewajiban (obligation)	65
<b>1.4</b>	Kerjasama dalam keluarga	84
<b>2</b>	<b>Modal Sosial Meso</b>	82
<b>2.1</b>	Kegiatan Penyuluhan	81
<b>2.2</b>	Norma Sosial (Sosial Norm)	80
<b>2.3</b>	Tingkat kemandirian	80
<b>3</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>80</b>
<b>3.1</b>	Pemberian Makanan Tambahan Balita	79
<b>3.2</b>	Pemberian Makanan Tambahan Ibu	72
<b>3.3</b>	Pemberian Makanan Tambahan Lansia	79
<b>3.4</b>	Pemberian Gizi	84
<b>3.5</b>	Imunisasi	90
<b>3.6</b>	Penyediaan Alat-alat kegiatan	66

3.7	Pembangunan Posyandu/Pos Kesehatan	92
3.8	Fogging	93
4	<b>Pendidikan</b>	86
4.1	Basiswa	86
4.2	Pengadaan Alat-alat Pendidikan	84
4.3	Pengadaan Prasarana Sekolah	82
4.4	Peralatan Sekolah	80
4.5	Pembangunan Prasarana Sekolah	82
5.1	<b>Daya Beli</b>	<b>80</b>
5.1	Pelatihan-Pelatihan Peningkatan Kapasitas	84
5.2	Semua Jenis Ternak bergulir	76
5.3	Semua Jenis Kegiatan Perguliran	79

Hasil jawaban responden ditunjukkan pada tabel diatas. Peneliti menetapkan kriteria dan sub kriteria yang terpilih menurut responden harus mempunyai skor total minimum 75% dari total maksimum yaitu  $75\% \times 100$  (20 responden  $\times$  skor 5) = 75. Skor ini merupakan skor yang logis, karena nilai ini dapat mepresentasikan kesepakatan dari 20 responden. Misalnya jika dari 20 responden memberikan skor 4 (setuju) dan hanya 1 responden yang memberikan skor 3 (kurang setuju) kepada suatu kriteria atau sub kriteria kriteria, maka skor totalnya adalah 79 sehingga kriteria/subkriteria itu sudah dapat dianggap disepakati dan direpresentatif sebagai kriteria dan sub kriteria Tabel diatas menunjukkan skor total dari kriteria dan subkriteria terpilih secara keseluruhan. Skor nilai yang menunjukkan dibawah skor nilai minimum 75 bermakna kriteria dan sub kriteria tidak disepakati untuk terpilih. Sehingga seluruh kriteria dan sb kriteria yang memiliki skor nilai diatas 75 merupakan kriteria dan sub kriteria terpilih menurut hasil jawaban responden. Pengalaman menunjukan bahwa skala 9 unitmasuk akal dan menunjukan tingkat dimana kita dapat membedakan intensitas hubungan antara elemen-elemen.

Tabel 4. Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama penting	Kedua elemen menyumbang sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebig penting dari pada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominan terhadap elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak lebih penting dari keriteria lainnya	Bukti yang menyokong elemem yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai tengah di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi di perlukan antara dua pertimbangan
Kebalikan dari atas	Jika aktivitas I mempunyai salah satu nilai boakn nol diatas ketika dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan ketika dibandingkan dengan i	

(Sumber: Saaty,1993,hal 85-86)

## 5. KESIMPULAN

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah expert (ahli) di bidangnya. Penentuan menggunakan *justify random sampling* dari 9 kecamatan yang ada di kabupaten Pringsewu, propinsi Lampung. Besarnya jumlah sampling responden dalam penelitian ini diperoleh 20 orang. Seluruh sampel terpilih ialah responden yang memenuhi kriteria. Hasil Penelitian ini ialah jawaban kuesioner dari para responden dengan menggunakan *skala like likert*, yang berisi lima tingkat jawaban dari 1 sangat tidak setuju samapi 5 sangat setuju. Dari hasil jawaban responden diperoleh 5 Kriteria terpilih dan 23 Sub kriteria terpilih dari 26 Subkriteria yang disediakan oleh Peneliti. Keseluruhan menunjukkan responden cenderung menyetujui berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebagai strategi penurunan kemiskinan di kabupaten Pringsewu.



## 6. SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten Pringsewu di Propinsi Lampung dan diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, S. (2013) Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas. *SOCIUS*. XII, 1-21.
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS) Pringsewu (2017). Pringsewu Dalam Angka 2017.
- [3] Feridani, Elena. (2005). Perancangan Metode Pembobotan Kriteria Pemilihan Pemasok Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Fuzzy AHP. (Studi Kasus Pemilihan Pemasok Jasa Pemeliharaan Fasilitas Off Shore di PT.X. *Tesis Universitas Indonesia*.
- [4] Fukuyama, F. (2005). Trust: the sosial virtue and the creation of prosperity, New York Free Press.
- [5] Djoghodikusumo, Sumitro. 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- [6] Kusumadewi, Sri. (2004). Fuzzy Quantification Theori untuk Analisis Hubungan antara Penilaian Kinerja Dosen oleh Mahasiswa, Kehadiran Dosen, dan Nilai Kelulusan. *Media Informatika. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia*.
- [7] Mangkuprawira, S. (2010) Strategi peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas sumberdaya manusia pendamping pembangunan pertanian. *Forum Peneliti Agro-Ekonomi*, 28(1), 19-34. <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/FAE28-1b.pdf>.
- [8] Muin, Sri Adrianti. (2013). Kajian Kemampuan Usaha dan Modal Sosial Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Sektor Industri Di Sulawesi Selatan Assets Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013 <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-4SRI%20ADRIANTI.pdf>
- [9] Munandar S. & Siti Homzah. (2005). Pengembangan (Modifikasi) Teori Modal Sosial dan Aplikasinya Yang Berbasis Masyarakat Petani Peternak (Studi Kasus Pendekatan Sosiologis Pada Kelompok dan Organisasi Usaha Tani Ternak Sapi Perah Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung). *Working Paper*
- [10] Pranadji, Tri. (2006). Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Mengelola Agro Ekosistem Lahan Kering (ALK), Kasus Di Desa-Desa Ex Proyek Bangun Desa Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Boyolali 24(2), 178-206. *Jurnal Agro Ekonomi*,
- [11] Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). (2010)
- [12] Simatupang, P., & S. K. Dermoredjo. (2003). Produksi domestik bruto, harga dan kemiskinan: hipotesis "trickle down" dikaji ulang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. 51(3). 253-370.
- [13] Saaty, Thomas L', (1990). Decision Making for Leaders - The Analytical Hierarchy process Decisions for in a Company World', *RWS publication*.
- [14] Saaty, Thomas-L' (1993). Analitik Pengambilan Keputusan Bagi para pemimpin, proses Hirarki untuk Pengambilan Keputusan dalam situasi Kompleks, seri Manajemen No. 134. *Jakarta : PT. pustaka Binaman pressindo*.
- [15] Saleh, K. Sumardjo, Hubeis, A, V., & Puspitawati, H. (2018) Penguatan modal sosial menuju kemandirian perempuan perdesaan pelaku industri rumahan emping melinjo di provinsi Banten. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 1-9.
- [16] Simatupang, P & Dermoredjo, S, K. (2003) Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, dalam *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 51 (3), 191 – 324.
- [17] Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (pdb) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8 (20), 357-366.